

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sertor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marihot Pahala Siahaa. 2008. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Moh. Saleh Djindang. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan kedelapan. Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Muchsan. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- N.M. Spelt dan Prof. J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.
- Paulus E. Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya. FH UNAIR.
- S. Prajudi Atmosudirdjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta. Liberty.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*. Yogyakarta. Grasindo.

### **Jurnal :**

- Abd Muis. 2016. "Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata". *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 4 No. 2.
- Evy Urmilasari. 2013. "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 6 No. 1.
- Herru Prasetya Widodo. 2011. "Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD)". *Jurnal Reformasi*. Vol. 1 No. 1.
- Imron Rosyadi. 2007. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 3 No. 2.
- Ivan Fauzani Raharja. 2013. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 15 No. 2.
- Ivan Fauzani Raharja. 2014. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 2 No. 2.
- Kusno. 2017. "Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 5 No. 2.
- Nurwigati. 2010. "Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan". *Jurnal Media Hukum*. Vol.17 No.1
- Nurya Siswi Enggarani. 2016. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali". *Jurnal Law and Justice*. Vol. 1 No. 1.
- Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3.
- Sukesi. 2017. "Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1 No. 2.

**Internet :**

Damang. 2014. *Pengertian Perizinan*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertianperizinan.html>. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13.20).

Laila Rohmatin. *Bantul Optimistis Target Kunjungan 300.000 Wisatawan Tercapai*. <https://bit.ly/2DCy54K> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB).

Laila Rohmatin. *Pasangan Tidak Resmi Terjaring di Pantai Parangtritis*. <https://bit.ly/2AcbI2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

Laila Rogmatin. *6 Pasangan Tidak Resmi Terjaring Razia di Pantai Parangtritis*. <https://bit.ly/2AcbI2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha.

Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Dan Gendung.  
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP.